

Daftar Pustaka

Literatur

- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Ed. Revisi, Cet.3*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia, cetakan keempat*, Jakarta, IND-HILL-CO, 2003.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- R, Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Marbun, S.F, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara, Cet.10*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Triwulan T. Titik, dan Gunadi Widodo, Isnu, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara IndonesiaI*, , Jakarta, Kencana, 2014.
- Mertokoesoemo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi Kedua*, Yogyakarta, 1985.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjajaran, 1960.
- Van Wijk, H.D, *Hoofdstukken van administratief recht*, Culemborg, Uitgeverij Lemma, 1988.
- Tjandra, Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya 2005.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah Edisi Revisi*, Purwokerto, STAIN Press, 2010.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006.
- Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soejono, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Aziz Hakim, Abdul, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Celeban Timur (Yogyakarta), Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Lopa, Baharudin, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Grafika, 1991.
- Salmon, Hendrik, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal Sasi, Vol. 16. No. 4, Oktober-Desember 2010.
- Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, cet 2, Bandung, Alumni, 1978.
- H. Koesoemahatmadja, R.D, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, cet 1, Bandung, Alumni, 1975.
- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill, 1992.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penerbitan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739)

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

Internet :

<https://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/07/15/penyelesaian-sengketa-tun-melalui-ptun/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Andy Lesmana, 2013, Batal Demi Hukum, <http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum-602043.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2017.